Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Dari PT Jasa Raharja (Persero) Bagi Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Mia Rasmiaty

ABSTRAK

*Asuransi kecelakaan penumpang merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang mungkin menimpanya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan santunan asuransi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian*

kepuustakaan (library research) dan analisis data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pelaksanaan santunan asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada beberapa penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Kata Kunci: Santunan Asuransi, Kecelakaan Penumpang, Jasa Raharja

Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa berwawasan lingkungan. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Terlepas dari berbagai risikonya, penumpang tetap akan menjalaninya, baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain.

Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah banyak dan padat. Hampir semua warga masyarakatnya menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas, mulai dari orang yang menggunakan alat transportasi untuk bekerja hingga pelajar untuk digunakan bersekolah. Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, salah satunya dengan melalui jasa asuransi.

Pemerintah memang melindungi masyarakatnya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero). Masyarakat berhak untuk mendapatkan santunan

apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam angkutan umum dengan memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Pasal 3 ayat (1) huruf a mengatur sebagai berikut:

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

PT Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan penumpang umum dalam perjalanan. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi

tuntutan santunan Jasa Raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Penumpang umum korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Penumpang umum korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 240 dan Pasal 241 mengatur bahwa : “Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan

sering dipersulit oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, korban atau ahli warisnya tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ada juga masyarakat terutama di daerah pedesaan tidak paham akan adanya dana santunan kecelakaan dari PT Jasa Raharja (Persero). Mereka menganggap bahwa dalam pengurusan santunan di PT Jasa Raharja (Persero) memerlukan waktu yang sangat lama, dan mereka menganggap percuma untuk mengurus dana santunan tersebut. Padahal dana santunan ini adalah hak seluruh masyarakat. Saat ini kinerja perusahaan Asuransi Jasa Raharja dapat dikatakan kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasikan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana pelaksanaan pemberian asuransi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang *Juncto*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan, serta menunjuk PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara.

Dana asuransi kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan penumpang.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, yaitu hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengatur bahwa:

a. Tiap penumpang yang sah dari

kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang.

Kemudian Pasal 3 ayat (2)-nya mengatakan bahwa: “Dengan pemerintah dapat diadakan pengecualian dan pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.”

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 telah menjelaskan dalam Pasal 10 ketentuan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas, telah menetapkan ketentuan mengenai dalam hal kendaraan bermotor umum antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggung jawaban bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan Jasa Raharja.

Kenyataannya ketentuan Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintahnya dalam kaitannya dengan

penghimpunan dana melalui iuran wajib dengan bersamaan pembayaran karcis atau tiket tidak dapat dilaksanakan karena berbagai macam hambatan dan kurangnya personal petugas dari PT Jasa Raharja (Persero) terutama di daerah terpencil. Oleh sebab itu, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak pengusaha dengan cara kolektif. Pihak pengusaha menyetorkan iuran wajib tersebut kepada PT Jasa Raharja (Persero) setiap tanggal 27 dalam setiap bulannya. Keuntungan yang didapat PT Jasa Raharja (Persero) memang efektif dan efisien, sedangkan di pihak pengusaha merasa rugi karena penyetoran tidak dipastikan jumlahnya karena adanya kendaraan yang tidak beroperasi.

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 disebutkan bahwa “setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 13.

Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas. Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungjawaban dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada

jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungjawaban diberikan kepada korban. Hak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan palisemen.

Pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak Pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk / dengan persetujuan Menteri. Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungjawaban harus diajukan

kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dalam Pasal ini untuk tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa. Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungjawaban, wajib diserahkan surat-surat bukti.

Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.

Hak atas ganti kerugian pertanggungjawaban seperti dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
- b. jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam

bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;

- c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungjawaban tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (2), dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungjawaban, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) tidak diterima oleh yang bersangkutan. Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang kereta api dalam kota, kereta api ringbaan dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 kilometer, dibebaskan dari iuran wajib dan bagi mereka tidak berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan ketentuan-ketentuan hukumannya, namun mereka menikmati jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri dan hak-hak yang bersangkutan menurut syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap sumbangan wajib dibayarkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) setiap tahun sekali melalui SAMSAT Kabupaten/Kota bersamaan

dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Cara pembayarannya menjadi satu dengan seluruh kewajiban atas perbaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada setiap SAMSAT Kabupaten/Kota. Sehingga tidak mungkin penghimpunan dana sumbangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Pasal 3 atau disebutkan pada setiap akhir bulan Juni. Oleh sebab itu Pasal 3 ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan atas kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pembayaran sumbangan wajib dibayar pada setiap tahun akhir masa STNK berlaku di setiap SAMSAT Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengenai besarnya sumbangan wajib ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965, Pasal 2 ayat (1), bahwa "Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan penumpang". Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progresif sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Penumpang (Pasal 3 ayat (2)).

PT Jasa Raharja (Persero) melalui SAMSAT Kabupaten/Kota berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan tersebut dalam upaya menghimpun dana pertanggungjawaban penumpang melalui sumbangan wajib. Dana yang sudah terhimpun selanjutnya dipergunakan sebagai dana pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas di

jalan raya, selain itu juga untuk biaya operasional PT Jasa Raharja (Persero), untuk pembayaran gaji pegawai dan disetor ke Kas Negara dalam upaya ikut serta dalam pembangunan nasional. Inilah kegunaan dan manfaat pasti bahwa sumbangan wajib sangat bermanfaat dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pelaksanaan santunan Asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964. Hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Hambatan yang timbul dalam pengelolaan PT Jasa Raharja (Persero) adalah berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan. Sehingga khususnya pegawai yang berada di lapangan sangat terbatas walaupun di setiap SAMSAT Kabupaten/Kota telah di tempatkan personil-personil yang handal di bidangnya. Namun sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi Jasa Raharja, penarikan iuran wajib dan penyaluran santunan Jasa Raharja. Dalam hal sosialisasi dan pelayanan keselamatan, yang berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan dan berkaitan dengan anggaran terjadi keterbatasan dan pro kontra dalam intern perusahaan itu sendiri terbukti

rambu-rambu terpasang oleh Jasa Raharja sangat minim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan santunan asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang

Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada beberapa penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero).

Daftar Pustaka

Buku-buku

Agus Purwoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC)*, BPFEE, Yogyakarta, 2003.

M. Karjadi, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeria, Bogor, 1975.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan.